



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BELITUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

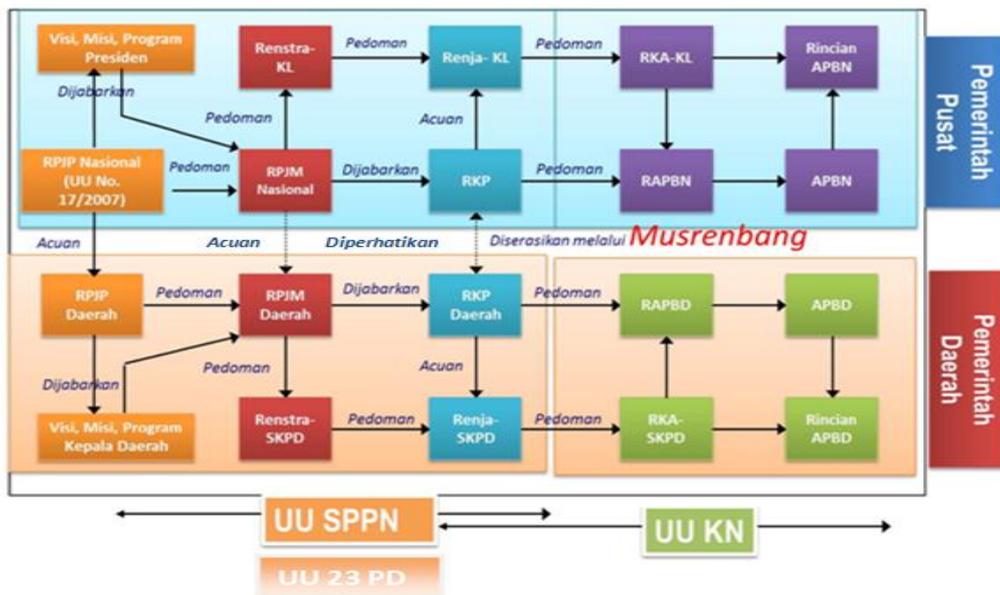
1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (DPPKBPMD Kabupaten Belitung) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah DPPKBPMD Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah DPPKBPMD Kabupaten Belitung Tahun 2025, sebagai berikut:

Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung;
 17. Peraturan Bupati Belitung No.14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

18. Peraturan Bupati Belitung No.39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung No.20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026
19. **Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025**

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah DPPKBPMD Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah DPPKBPMD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk

1. Menyelaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan;
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah DPPKBPMD Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari tahapan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada tahun lalu telah menggunakan Renstra yang baru pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah daerah dan program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Capaian kinerja Renstra PD sampai deangan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4x100)	
2	Urusan: Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar										
2	Bidang Urusan: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	Program :	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
			Indek profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	81%	75%	75,50%	100,67%	75%	231,50%	308,67%
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

**Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025**

2	13	1	2	1	Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran :	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6	6	6	6	100	6	18	300	
											Dok	Dok	Dok	%	Dok	Dok	%
2	13	1	2	1	Sub Kegiatan :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	3	9	300	
									Dok	Dok	Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	
2	13	1	2	7	Sub Kegiatan :	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran :	Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	3	9	300	
									Lap	Dok	Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	
2	13	2	2	2	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran :	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	6	300	
									Dok	Dok	Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	
2	13	1	2	1	Sub Kegiatan :	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran :	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	30	14	30	29	97	30	73	243	
									Orang/bulan	Bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	%	Orang/bulan	Orang/bulan	%	
2	13	1	2	8	Sub Kegiatan :	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran :	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2	2	2	2	100	2	6	300	
									Dok	Dok	Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	
							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		75%	81%	75%	75,50%	100,67%	75%	232%	309%	
2	13	1	2	5	Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran :	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	29	25	26	29	112	29	83	286,2	
									Orang	Orang	Orang	Orang	%	Orang	Orang	%	
2	13	1	2	2	Sub Kegiatan :	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran :	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	25	26	26	100	1	1	100	
										Stel	Stel	Stel	%	Paket	Paket	%	

**Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025**

2	13	1	2	9	Sub Kegiatan :	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran :	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	0	0	0	0	7 Orang	7 Orang	100 %
							Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	1	2	6	Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran :	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	13	1	2	1	Sub Kegiatan :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran :	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	200 %
2	13	1	2	2	Sub Kegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	0	2 Paket	2 Paket	100 %	3 Paket	5 Paket	167 %
2	13	1	2	3	Sub Kegiatan :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran :	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
2	13	1	2	4	Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran :	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %
2	13	1	2	5	Sub Kegiatan :	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran :	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100 %			
2	13	1	2	06.	Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	100%	1 Dok	1 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	100 %
2	13	1	2	09.	Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran :	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Lapora	100 %

2	13	1	2	8	Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran :	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100	100	100	100	100	100
											%	%	%	%	%	%
2	13	1	2	1	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	12	12	100	12	12	100
											Laporan	Laporan	%	Laporan	Laporan	%
2	13	1	2	2	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	0	12	12	100	12	12	100
											Laporan	Laporan	%	Laporan	Laporan	%
2	13	1	2	4	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	0	12	12	100	12	12	100
											Laporan	Laporan	%	Laporan	Laporan	%
							Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	1	2	7	Kegiatan :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran :	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 Jenis	3 Jenis	1	3	100	1	1	100
											Jenis	Jenis	%	Jenis	Jenis	%
2	13	1	2	7	Sub Kegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Printer	13	0	0	0	0	7	7	100
									Unit		Unit	Unit	%	Unit	Unit	%
2	13	1	2	8	Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran :	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	4	2	2	4	50	1	7	175
									Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	%	Jenis	Jenis	%
2	13	1	2	2	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran :	Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	21 Unit	29 Unit	21	21	100	21	21	100

							Operasional atau Lapangan										
											Unit	Unit	%	Unit	Unit	%	
					Sub Kegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	49 Unit	35 Unit	49	22	45	49	39	80	
					Sub Kegiatan :	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100	3	3	100	
									Unit	Unit	Unit	Unit	%	Unit	Unit	%	
2					Urusan : Urusan Pemerintahan												
2	13				Bidang Urusan : Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
2	13	4			Program : Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase pengisian Prodeskel yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2	13	4	2.01		Kegiatan :	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Keluaran :	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	1	1	1	1	100	1	3	300	
									Dok	Dok	Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	
2	13	4	2.01	1	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Keluaran :	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12	0	12	12	100	12	24	200	
									Dok		Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	
							Persentase Pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2	13	4	2.01	2	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	14	0	14	8	57	14	22	157	
									Dok		Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	

						Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											
									Dok	Dok	Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	
2	13	5	2.01	2	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	0	1	1	100%	1	2	200	
									Dok		Dok	Dok	%	Dok	Dok	%	
2	13	5	2.01	3	Sub Kegiatan :	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Keluaran :	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	0	1	1	100	1	2	200	
									Lembaga		Lembaga	Lembaga	%	Lembaga	Lemba ga	%	

2	13	5	2.01	4	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Keluaran :	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	92 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	13	5	2.01	6	Sub Kegiatan :	. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 laporan	100 %
2	13	5	2.01	9	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran :	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dok	0	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	2 Dok	200 %
					URUSAN : PEMERINTAH WAJIB											
2	14					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK										
2	14	2			Program Pengendalian Penduduk		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)		80%	0	70%	70%	100%	80%	150%	188%
2	14	2	2.01		Kegiatan :	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Keluaran :	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	1	0	1	1	100	1	2	200

									Dok		Dok	Dok	%	Dok	Dok	%
2	14	2	2.02	5	Sub Kegiatan :	Penguatan Kerja sama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Keluaran :	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja sama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	0	1	1	100	1	2	200
									Dok		Dok	Dok	%	Dok	Dok	%
2	14	2	2.02	10	Sub Kegiatan :	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	1	0	0	0	0	1	1	100
									Laporan					Laporan	Lapora n	%
2	14	2	2.02		Kegiatan :	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Dokumen program Bangsa Kencana	1	0	0	0	0	1	1	100
									Dok					Dok	Dok	%
2	14	2	2.02	8	Sub Kegiatan :	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Keluaran :	Dokumen rumah data Kependudukan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	14	2	2.02	12	Sub Kegiatan :	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Keluaran :	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	0	0	0	0	12	12	100
									Laporan					laporan	Lapora n	%
2	14	3			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang		15%	14,85%	14%	14,40%	102,86%	15%	44,25%	295,00%
2	14	3	2.02		Kegiatan :	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Keluaran :	Penyuluh KB/PLKB	12	7	12	7	58,3	12	26	217
									orang	Orang	Orang	Orang	%	Orang	Orang	%

2	14	3	2.02	3	Sub Kegiatan :	Penguatan Pelaksanaan, Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan, Penyuluhan, Penggerakan,	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan, Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	12	0	12	12	100	12	24	200
									Laporan		Laporan	Laporan	%	laporan	Laporan	%
2	14	3	2.02	4	Sub Kegiatan :	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Keluaran :	Honorarium PPKBD dan sub PPKBD	269	12	269	269	100	269	550	204
									Orang	Orang	Orang	Orang	%	Orang	Orang	%
2	14	3	2.04		Kegiatan :	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Keluaran :	Pokja yang dibina	0	0	0	0	0	0	0	0
2	14	3	2.04	4	Sub Kegiatan :	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Keluaran :	Lomba Kampung KB	0	0	0	0	0	0	0	0
2	14	3	2.03		Kegiatan :	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Laporan pendistribusian alokan	2	2	2	2	100	2	6	300
									Dok	Dok	Dok	Dok	%	Dok	Dok	%

2	14	3	2.03	3	Sub Kegiatan :	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Keluaran :	Jumlah Orang yang mengikuti kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	350	0	350	612	174,9	350	962	274,9
									Orang		Orang	Orang	%	Orang	Orang	%
2	14	3	2.03	13	Sub Kegiatan :	Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi difasilitasi Kesehatan dan Kelompok kegiatan	Keluaran :	Jumlah Orang yang mendapatkan Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi difasilitasi Kesehatan dan Kelompok kegiatan	40	0	0	0	0	40	40	100
									Orang					Orang	Orang	%
2	14	2	2.01	7	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Keluaran :	Tersedianya sarana pengelolaan data di Balai Penyuluhan KB	1	3	3	1	100	1	1	100
									Laporan	Balai	unit pc	Laporan	%	Laporan	Laporan	%
2	14	4			Program :	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		78	38,9	77	79	10253,25%	78%	119	152,09
									%	%	%	%	%	%	%	%
2	14	4	2.01		Kegiatan :	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran :	Laporan pelaksanaan Pembinaan peran serta Organisasi masyarakat dalam pembangunan Keluarga	21	1	1	1	100	21	1	100
									Kelompok Kegiatan	Dok	Dok	Dok	%	Kelompok Kegiatan	Dok	%
2	14	4	2.01	2	Sub Kegiatan :	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluaran :	Tersedianya BKB KIT Stunting	0	36	18	18	100	0	0	0
										Unit	Unit	Unit	%			

2	14	4	2.01	3	Sub Kegiatan :	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluaran :	Jumlah Laporan hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	0	1	1	100	1	1	100
									Lap		lap	Lap	%	Lap	Lap	%
2	14	4	2.01	4	Sub Kegiatan :	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesajhteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluaran :	Jumlah Laporan hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	0	0	0	0	0	0
									Dok					Dok	Dok	%
2	14	4	2.01	8	Sub Kegiatan :	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Ketahanan dan Kesahtraaan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Keluaran :	Peserta Promosi, Sosialisasi dan Pembinaan Kader BKB, BKR, BKL	0	0	0	0	0	0	0	0
2	14	4	2.02		Kegiatan :	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran :	laporan pembinaan peran serta Organisasi	1	21	21	59	281	1	81	81
									Dok	Kelompok Kegiatan	Kelompok Kegiatan	Kelompok Kegiatan	%	Dok		%

2	14	4	2.02	2	Sub Kegiatan :	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluaran :	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	0	1	1	100	1	2	200
									Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	%	Laporan		%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan DPPKBPMK Kabupaten Belitung tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

1). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Untuk indikator kinerja “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2023 menurut data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencapai 1,17%. Atau **meningkat** 0,06% dari kondisi awal tahun 2022 sebesar 1,23% dengan perbandingan capaian tahun 2023 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung tahun 2023 telah mencapai 230,7%.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia pada 2023 berada di angka 1,13%.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kab. Belitung Tahun 2018-2023



LPP berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Walaupun banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk seperti faktor migrasi dan tingkat kelahiran, namun tetap harus ada upaya untuk menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Pengendalian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga dapat mencapai atau hampir mendekati angka yang ditargetkan pada tahun akhir Renstra.

Dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, upaya untuk meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah:

1. Kampanye program KB (Keluarga Berencana) untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga. Selain itu program KB juga dapat berfungsi untuk menekan jumlah angka kelahiran.
2. Mengoptimalkan kegiatan di balai penyuluhan KB di tiap kecamatan

3. Menunda masa perkawinan dini untuk mengurangi jumlah angka kelahiran.
4. Menggalakkan program transmigrasi supaya kepadatan penduduk tidak hanya di suatu daerah tertentu saja, tetapi juga menyebar ke daerah lain.
5. Meningkatkan kesadaran akan mitos “banyak anak banyak rejeki” di kalangan masyarakat.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh dan terus menerus terhadap kualitas informasi dan data program Bangga Kencana
7. Meningkatkan pendidikan dan pemahaman bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat berdampak bagi negara.

Faktor yang mendorong peningkatan capaian kinerja adalah

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
2. Meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi metode jangka panjang oleh masyarakat;
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga dan perilaku hidup sehat;
4. Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan sebagai tempat promosi dan KIE program Bangga Kencana secara maksimal;

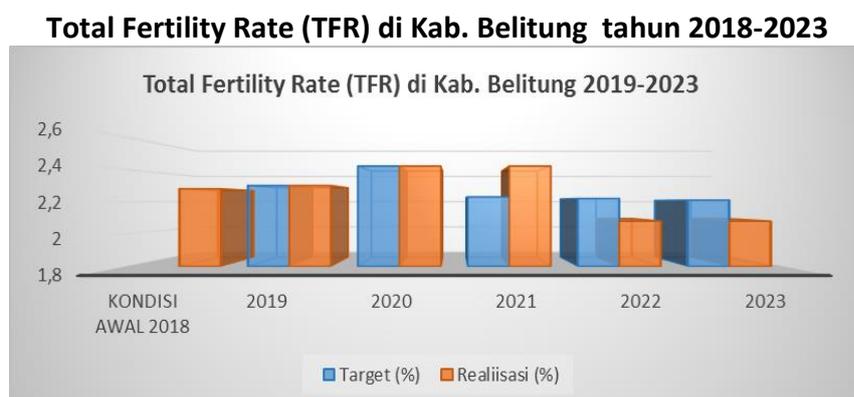
Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan/pengetahuan kader IMP sehingga pelaksanaan KIE dilapangan belum optimal
2. Masih rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelompok kegiatan baik untuk menjadi kader pengelola maupun sebagai anggota kelompok kegiatan dan
3. Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menolak program Keluarga Berencana dikarenakan bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut.

2) Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung dan Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 adalah 2,08%. Jika dibandingkan pencapaian tersebut dengan pencapaian tahun tahun 2022. Artinya bahwa jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya pada tahun 2023 dapat di pertahankan seperti tahun sebelumnya.

Capaian kinerja tahun 2023 telah sesuai dengan target akhir Renstra PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung tahun 2023 dan dapat dilihat perkembangannya seperti berikut ini



Meskipun pencapaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun tetap saja terdapat permasalahan atau faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja seperti:

1. Meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dalam berkeluarga;
2. Meningkatnya peran serta tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan Insitusi Masyarakat Pedesaan) dalam melaksanakan promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
3. Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan sebagai tempat promosi dan KIE program Bangga Kencana secara maksimal;

Sedangkan hal-hal yang menjadi pendorong pencaipan target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah angka pernikahan dan kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun) di Kabupaten Belitung.
2. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pemakaian alat dan obat kontrasepsi.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat perencanaan berkeluarga.
4. Meningkatnya peran serta petugas lini lapangan dalam melaksanakan tugas KIE program Bangga Kencana.
5. Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di tiap kecamatan secara optimal.
6. Meningkatnya pengetahuan masyarakat di Kampung KB tentang Program Bangga Kencana.

Solusi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang datang adalah:

1. Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral.
2. Pembinaan yang lebih intensif kepada kader IMP.
3. Memberikan pembinaan kepada PKB/PLKB, mitra kerja serta kader di lini lapangan terkait pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan pengendalian lapangan

3) Meningkatnya Persentase PUS ber KB

Indikator “Meningkatnya Persentase PUS ber KB ” pada tahun 2023 adalah 0,59%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Persentase PUS ber KB pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 kondisi Persentase PUS ber KB adalah 0,40%. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai 0,75% atau lebih adalah sebesar 78,67% dan dapat di;iat perkembangannya seperti di bawah ini

Meningkatnya Persentase PUS ber KB di Kab. Belitung (2018-2023)



Ada beberapa faktor yang sangat mendukung dalam upaya meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB diantaranya adalah:

1. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pemakaian alat dan obat kontrasepsi sebagai upaya mengatur kelahiran;
2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dalam berkeluarga;
3. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembangunan KKBPK dengan adanya penambahan tenaga PKB (PPPK) dan Non ASN

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Masih adanya stigma di masyarakat mengenai keinginan mendapatkan anak dengan kelamin yang berbeda,
- 2) Adanya ketakutan tertentu terhadap rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi (misal KB MOP (vasektomi) dapat menurunkan libido pria, KB suntik/pil yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada wanita)

Adapun upaya untuk meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengoptimalkan promosi KB di masyarakat melalui berbagai media promosi diantaranya media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang pentingnya mengetahui kontrasepsi yang tepat sasaran,
2. memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk mengetahui target akseptor KB agar KIE tepat sasaran,
3. meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB.
4. Mengusulkan perekrutan tenaga Penyuluh KB untuk pemenuhan idealnya proporsi jumlah tenaga penyuluh dengan wilayah (desa) yang dibina.

4). Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP

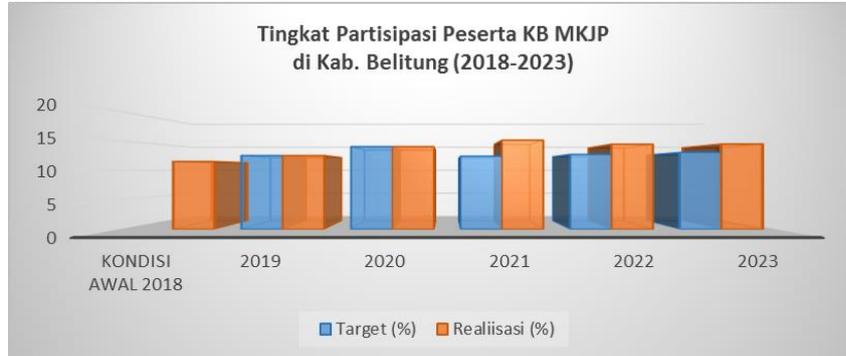
Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifannya tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi non mkjp. Dikarenakan efek samping dari MKJP lebih sedikit, dan efektivitas MKJP lebih tinggi dibandingkan dengan non MKPJ, sehingga program pemerintah 2 anak lebih baik yang bertujuan untuk menekan laju penduduk dapat terealisasi.

rendahnya jumlah Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor predisposing yaitu faktor pengetahuan, nilai atau kepercayaan dan sikap, serta faktor pemungkin yaitu fasilitas, biaya, jarak dan ketersediaan transportasi sedangkan faktor penguat yaitu dari dukungan suami dan keluarga. Tingkat pengetahuan masyarakat sangat memiliki hubungan yang relevan dengan penggunaan MKJP. Akseptor KB yang memiliki pengetahuan tinggi memiliki peluang sebesar 2.6 kali lebih besar. untuk menggunakan MKJP

Realisasi Indikator "Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP" pada tahun 2023 adalah 14,43%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2023 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 kondisi Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP adalah 14,40%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai angka 13,00% atau lebih telah melampaui target yaitu sebesar 111%. Namun dengan pencapaian

seperti kondisi sekarang ini harus tetap membutuhkan upaya yang lebih serius agar Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun-tahun mendatang terus meningkat. Undang-undang dan peraturan untuk pelaksanaan Program Bangga Kencana. Berikut gambaran tingkat partisipasi peserta KB MKJP di Kabupaten Belitung pada Tahun 2018- 2023:

Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP di Kab. Belitung (2018-2023)



Faktor pendukung peningkatan

1. Undang-undang dan peraturan untuk pelaksanaan Program Bangga Kencana
 2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan Bangga Kencana..
 3. Dukungan dana, sarana dan prasarana baik APBN/DAK dan APBD.
 4. Kerjasama yang baik dengan mitra kerja baik instansi vertikal dan OPD terkait dilingkungan Pemkab Belitung.
 5. Peran serta Pemerintahan desa di lini lapangan, PKB, PLKB, IMP dan Kader KB
- Dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala atau faktor penghambat pencapaian kinerja seperti misalnya:
- a. Kondisi lingkungan sosial budaya di sebagian masyarakat yang masih menganggap KB merupakan urusan perempuan dimana keputusan untuk ber-KB diserahkan kepada kaum perempuan,
 - b. Rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi.
- Dengan demikian solusi dan rekomendasi yang dapat diambil dalam peningkatan kinerja adalah :
- optimalisasi media elektronik dan media sosial sebagai ajang promosi dan advokasi kepada masyarakat tentang KB MKJP dan KB Pria,
 - meningkatkan peran Institusi Masyarakat (Kelompok KB, IMP, PKK) dalam Konseling Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi.

5) Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju

Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju yang targetnya pada tahun 2023 adalah berjumlah 33 Desa dengan IDM Desa Maju dengan indikator kinerja: Persentase peningkatan jumlah Desa Maju dengan target 10.7%. Perkembangan Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju dari tahun 2018-2023 dan seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Perbandingan Jumlah Desa Maju Tahun 2018 -2023



Data capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 yaitu desa dengan Status Desa Maju adalah merupakan akumulasi dari desa Maju dan desa Mandiri yang secara target untuk jumlah IDM desa Maju sudah melebihi target akan tetapi dengan definisi operasional untuk Persentase peningkatan jumlah Desa Maju seperti yang di jabarkan diatas maka peningkatan jumlah desa maju tahun 2022 dan 2023 tidak terlalu signifikan yaitu 37 Desa untuk Tahun 2022 dan 40 Desa untuk tahun 2023 dari 42 jumlah seluruh desa di kabupaten Belitung (kenaikan status berjumlah 3 desa) sehingga dengan definisi operasional tersebut target Persentase peningkatan jumlah Desa Maju untuk Tahun 2023 tidak mencapai target yaitu 8,11% dari 10.7% target yang di ditetapkan untuk tahun 2023.

Ada banyak hal yang jadi faktor pendorong peningkatan Status Desa Maju dan Desa Mandiri diantaranya adalah potensi desa terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam kebanyakan berada di sektor agraris. Sedangkan sumber daya manusia mencakup kualitas pendidikan masyarakat dan aparat pemerintah desa. Selain itu, potensi di sektor pariwisata terkadang dapat menunjang kemajuan desa.

Ketajaman prioritas, inovasi kegiatan dan kualitas perencanaan desa akan menentukan secara signifikan kecepatan perkembangan desa. Kuatnya dukungan kapasitas pemerintah desa yang memadai serta partisipasi masyarakat yang tinggi dan sinergi kelembagaan desa juga menjadi faktor pendorong yang penting untuk peningkatan status desa ini. Kemampuan pemerintah desa dengan kewenangan desa serta keuangan desa yang mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Perkembangan kemandirian desa terpotret dari Indeks Desa Membangun yang mengarah pada ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkolerasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, terdiri dari :

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari :
 - a. Dimensi Modal Sosial (Indikator Solidaritas Sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial);
 - b. Dimensi Kesehatan (Indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
 - c. Dimensi Pendidikan (Indikator akses ke pendidikan dasar, menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan

- d. Dimensi Pemukiman (Indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunitas).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang terdiri dari Dimensi Ekonomi (Indikator Keragaman produksi masyarakat desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga Ekonomi dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKE) terdiri dari Dimensi Ekologi (Indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Dari data pada grafik yang disajikan dapat disimpulkan bahwa capaian “Jumlah desa dengan IDM Desa Maju” pada tahun 2023 mengalami peningkatan status desa menjadi 40 Desa yang terdiri dari Desa dengan IDM Desa Maju menjadi 23 desa dan desa yang mengalami peningkatan menjadi Desa dengan IDM Desa Mandiri sebanyak 17 Desa di Kabupaten Belitung. Sehingga mengalami peningkatan 8,11%. Dilihat perbandingannya dengan capaian tahun 2023 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah 121,21%. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, maka ada peningkatan 8,11% jumlah desa dengan IDM Desa Maju dan diantara peningkatan tersebut terdapat 9 Desa dengan IDM Desa Maju. Berikut adalah rekapitulasi desa dengan status IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

1. Perkembangan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa pada tahun 2024 diupayakan melalui program-program:
 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPPKBPMD Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung

Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Proyeksi				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indikator Tujuan dan Sasaran																		
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				2,28%	1,93%	2,70%	2,70%	2,70%	2,28%	1,93%	1,26%	1,23%	1,17%	100%	100%	214,29%		
Total Fertility Rate (TFR)				2.30	2.42	2,23	2.22	2,21	2.30	2,42	2,42	2,08	2,08	100%	100%	92,15%		
Meningkatnya Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) Ber KB				0,25%	025%	0,25%	0,50%	0.75%	0,25%	0.25%	0,55%	0,40%	0,59	100%	100%	220%		
Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP				12,49%	13,99%	12,37 %	12,67	13,00	12,49%	13,99%	15,08%	14,40%	14,43	100%	100%	121,82%		
Jml desa dengan IDM Desa Maju				20 Desa	23 Desa	29 Desa	31 Desa	33 Desa	20 Desa	23 Desa	29 Desa	37 Desa (28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri)	40 Desa (23 Desa Maju dan 17 Desa Mandiri)	100%	100%	100%		
Persentase peningkatan jumlah Desa Maju				100%	15%	8,7	12	10,7	100%	15%	8,7%	27,58%	8,11%	100%	100%	100%		
Indikator Program																		
Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan						60%	100%	100%			100%	100%						
Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah						75%	75%	75%			80%	85%						
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah						100%	100%	100%			100%	100%						
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100%	100%	100%			100%	100%						
Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk							70%	80%										

pengendalian penduduk (GDPK)																		
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					14%	14%	15%			14,85%	14,40%							
Persentase PUS Ber KB					76%	77%	78%			78,44%	98.95%7							
Persentase BUMDesa aktif tiap desa				76,19%	83%	100%	100%	100%		100%	100%	100%						
Persentase Pengisian Prodeskel yang sesuai dengan peraturan yang berlaku					100	100%	100%	100%		100%	100%	100%						
Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase Kelembagaan Desa Aktif					9920%	-	95%	100%		100%	100%	100%						

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang profesional sebagai konsekuensi dasarnya arus informasi dan arus globalisasi, maka DPPKBPMK Kabupaten Belitung akan mengambil langkah langkah menuju perubahan dan mempersiapkan guna menyempurnakan hal-hal yang diperlukan dalam penyempurnaan kekurangan selama ini dalam menghadapi tantangan yang akan datang yang sudah barang tentu permasalahan yang akan dihadapi akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan persiapan tersebut sangat perlu dilakukan sebagai deskripsi mengenai apa yang akan terjadi di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah persiapan yang perlu diambil guna mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, kredibilitas serta memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan.

Kekurangan dan kelemahan di masa lalu dapat disempurnakan di masa mendatang, kualitas perencanaan lebih ditingkatkan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan menyeluruh. Koordinasi lintas program juga perlu dilakukan dalam upaya untuk mengurangi ego sektoral masing-masing.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan organisasi yang jelas, lingkungan organisasi terutama yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi, adaptif yang artinya penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul untuk memanfaatkan peluang yang ada karena capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap akan menjadi fokus utama dalam rencana strategis.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPPKBPMK Kabupaten Belitung, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Adanya kewenangan di bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 2) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- 3) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- 4) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya sistem informasi data terpadu;
- 3) Rendahnya kualitas SDM di lini lapangan (Kader dan PSM)
- 4) Kurang optimalnya kinerja kader (BKKBD/Sub PKKBD) dalam melakukan penggerakan masyarakat untuk menggunakan KB MKJP
- 5) Kurang berfungsinya tenaga swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan /menggerakan partisipasi masyarakat
- 6) Perubahan aturan/kebijakan di tingkat pusat maupun daerah seiring dengan pergantian kepemimpinan

Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

- 1) Adanya Penyaluran alat kontrasepsi dan Pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Prasejahtera dan KS.I
- 2) Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberikan mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam hal ini BKKBN mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan nasional, penerapan Standart Prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordibnasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan.
- 3) Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB
- 4) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperjelas pebagian kewenangan pengelolaan Program KB di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Dukungan Pemerintah Pusat untuk Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui DAK Sub Bidang KB
- 6) Adanya upaya untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK pada Pemerintahan Desa dan kelurahan dengan kegiatan bimbingan teknis.
- 7) Adanya pemberian bantuan dana bergulir terhadap Kelompok-kelompok usaha pada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
- 8) Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan turunanannya melalui Peraturan Pemerintah, Permendagri sampai peraturan Bupati tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu,
- 9) Sudah tersusunnya regulasi (dalam bentuk peraturan Bupati dan Peraturan Daerah) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 10) Peluang untuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan masyarakat desa di mungkinkan melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui Bimtek dan diseminasi peraturan terbaru dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- 11) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya,
- 12) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,
- 13) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif,
- 14) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

ANCAMAN (T):

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan
- 3) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Masih terdapat jumlah keluarga miskin;
- 5) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

- 6) Masyarakat masih membedakan arti ber KB laki-laki dan perempuan
- 7) Belum dilaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai kendala di atas, jika disikapi dengan bijak justru akan dapat menjadi tantangan dan peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan PD. DPPKBPMD Kabupaten Belitung ke depannya

Rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD DPPKBPMD Kab. Belitung, adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pernikahan pada usia remaja
Promosi pendewasaan usia perkawinan melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja dan PIK R baik itu jalur sekolah, jalur masyarakat, sakaencana dan sekolah siaga kependudukan belum optimal.
2. Tingginya angka perceraian
Pernikahan usia dini dan faktor ekonomi menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga.
3. Tingginya angka keluarga beresiko stunting
Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai gizi seimbang, pola asuh yang baik, perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Peningkatan ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang belum optimal.
Lembaga usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PADes
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa
Potensi desa, merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa seharusnya dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa untuk mendorong kemandirian masyarakat yang ada di desa melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Program Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar, dan
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta
7. Memperkuat stabilitas Foinukhankam dan transformasi peiayanan publiik.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa untuk mencapai tujuan nasional perlu adanya penguatan di bidang komunikasi dan informatika dengan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 disusun secara simultan dengan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana strategi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan umum DPPKBPMK Kabupaten Belitung untuk jangka menengah PD adalah :

1. Terwujudnya Program Bangga Kencana.

Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Indikator dari tujuan ini adalah:

- **iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)**

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga menjadi indikator penting untuk mengukur

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.

Berdasarkan penetapan indikator kinerja program Bangga Kencana Kabupaten Belitung Tahun 2022 oleh perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 60,32

2. Meningkatkan Perkembangan Desa Mandiri

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa adalah merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Indikator dari tujuan ini adalah:

- **Jumlah desa dengan status Desa Mandiri**, dimana status Desa ditetapkan dengan ambang batas, sebagai berikut :
 1. Desa Sangat Tertinggal : $\leq 0,491$
 2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$
 3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$
 4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$
 5. Desa Mandiri : $> 0,815$

b. Sasaran

Sasaran yang dirumuskan oleh DPPKBPMD Kabupaten Belitung merupakan penjabaran dari masing masing tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan dialokasikan dalam 3 (tiga) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi atau operasional organisasi.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi dan merupakan dasar kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang.

Sasaran dalam pelayanan PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung adalah :

1. Meningkatkan kualitas keluarga dengan indikator kinerja :

- Total Fertility Rate (TFR)

Yang dimaksud Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur (**Sumber: Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana**).

2. Meningkatkan Penguatan ketahanan ekonomi desa dengan indikator kinerja :

- Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri,
Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan dan memiliki Indeks Desa Membangun : > 0,815
Dengan demikian DPPKBPMD merumuskan sasaran jangka menengah PD seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitng Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi awal (2022)	Target Kineja pada Tahun Ke		
					2024	2025	2026
1	2	3	4		6	7	8
1.	Terwujudnya program Bangga Kencana		iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Ket: sumber data Pendataan Keluarga	n/a	60,32	60,50	60,68
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Ket: sumber data SIGA	2,42	2,41	2,40	2,39
2.	Meningkatnya Perkembang Desa Mandiri		Jumlah desa dengan status Desa Mandiri Ket: sumber data Kemendes Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	9 Desa	20 Desa	25 Desa	30 Desa
		Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa	Jumlah desa dengan status Desa Mandiri Ket: sumber data Kemendes Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	9 Desa	20 Desa	25 Desa	30 Desa

Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2026, berdasarkan yang tertuang didalam RPD Kabupaten Belitung 2024-2026.

1.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

(1) Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan **Sustainable Development Goal's** (SDG's). Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Bagian SDG's yang di dukung oleh perangkat Daerah yaitu:

- **Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** di tujuan ke 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera) dari 17 tujuan SDGs yang menyebutkan adanya jangkauan akses yang lebih baik ke metode kontrasepsi, pelayanan keluarga berkualitas, dan promosi yang terus menerus pada pengurangan stigma pada perempuan dan kaum yang termarginalkan, dengan menjalin kemitraan global yang mempunyai aksi lokal nyata di masing-masing wilayah.

Program yang mendukung dengan dukungan indikator kinerja:

1. Program Pengendalian Penduduk
Indikator kinerja Unmet need dengan target 11,92%
 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
Indikator kinerja Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan target 14,6%
 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Indikator kinerja Persentase PUS Ber KB dengan target 75,10%
- **Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, mendukung Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan) Tujuan 6 (Air bersih dan sanitasi yang layak) Tujuan 16 (Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)
Tujuan-tujuan tersebut di atas didukung oleh Program-Program:
 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku dengan target 100%
 - Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa dengan target 35%
 2. Program Pemberdayaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan dukungan indikator kinerja:
 - Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif dengan target 87%
- (2) Mendukung pencapaian 16 Program Inovatif kepala daerah yaitu:
- **Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** mendukung pencapaian salah satu dari 16 Program Inovatif Kepala Daerah, yaitu Program AMBONG. Program ini didukung dengan indikator-indikator kinerja dari Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) adalah Program Ambong (Asupan Untuk Anak Balita dan Ibu Mengandung) dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), meningkatkan pelayanan KB Pasca Persalinan untuk kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pembinaan kesehatan reproduksi.
 - **Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** mendukung pencapaian beberapa Program Inovatif Kepala Daerah antara lain:
 1. Program Keminangan yaitu Kearifan lokal dan adat istiadat sebagai inspirasi pembangunan
 2. Program Tusena yaitu satu desa satu destinasi yang bersifat tematikProgram-program inovatif tersebut didukung indikator-indikator kinerja dari Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program yang ada.
- (3) Mendukung pencapaian KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan mendukung KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) antara lain :

1. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan serta Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga antara lain :
Melalui salah satu program Pembangunan Keluarga yaitu pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada wilayah KEK dan KSPN. UPPKS merupakan kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan terutama ibu/wanita yang berasal dari keluarga pra sejahtera, sejahtera I sampai sejahtera III plus, baik yang belum, sedang maupun peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.
 2. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :
Untuk mendukung KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yaitu :
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerja sama antar desa di beberapa desa untuk potensi pariwisata telah dikelola oleh BUMDesa masing-masing contohnya ARB (Air Rusa Berehun) yang berlokasi di Desa Terong dimana saat ini telah menjadi tujuan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemanfaatan kolong bekas tambang menjadi tempat wisata serta tersedianya cottage dan wisata edukasi. Wisata edukasi kelompok sadar wisata di Desa Terong, Pembuatan kapal di Desa Batu Itam.
Sedangkan Mendukung pencapaian KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yaitu Program Administrasi Pemerintahan Desa yaitu Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerja sama antar desa yang saat ini telah terbentuk 36 BUMDesa dari 42 Desa se Kabupaten Belitung.
- (4) Mendukung Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu
1. Untuk Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan: Dari 4 desa di kecamatan Selat Nasik yang termasuk kawasan perdesaan prioritas nasional terdapat 2 desa yang menjadi Kampung KB yaitu Desa Petaling dan Suak Gual.
embentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu penggarapan Kampung KB juga melibatkan semua sektor pembangunan. Kampung KB tidak hanya berbicara mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja tetapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa yaitu Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerja sama antar desa, yang saat ini Kecamatan Selat Nasik merupakan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mendanau Sejahtera yang merupakan gabungan dari 4 (empat) Desa di Kecamatan Selat Nasik yaitu Desa Selat Nasik, Desa Suak Gual, Desa Petaling dan Desa Pulau Gersik yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi di Wilayah Kecamatan Selat Nasik dengan Unit-unit usaha yang dapat mendukung KPPN.

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023 dengan total rencana pagu indikatif sebesar Rp. 14.336.653.032,20

Dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ini, Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung merencanakan 6 program dan 17 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan tersebar di beberapa lokasi seperti di 5 Kecamatan, 42 desa dan 7 Kelurahan serta Luar Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 4.1

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025 Kabupaten Belitung
Perangkat Daerah: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung tahun 2024 merupakan suatu dokumen dalam kaitannya dengan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan diakhiri dengan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 akan memberikan gambaran lebih mendetail dari arah pembangunan yang ditetapkan dalam program pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung berupa pokok-pokok pikiran dan tindakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Belitung 2024 - 2026 yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja mulai dari tujuan dan sasaran didalam dokumen ini diharapkan dapat diukur capaian kerjanya.

Demikian Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024 ini yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan ini akan menjadi pedoman Kinerja DPPKBPMD Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, Oktober 2024

Kepala DPPKB PMD

